



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

**CATATAN RAPAT  
KOMISI X DPR RI  
(BIDANG: PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN  
OLAHRAGA, RISTEKDIKTI RI, BADAN EKONOMI KREATIF DAN  
PERPUSTAKAAN NASIONAL)**

---

Tahun Sidang	: 2015 – 2016.
Masa Persidangan ke-	: III (tiga).
Sifat Rapat	: Terbuka.
Jenis Rapat	: <b>Dengar Pendapat Umum.</b>
Dengan	: <b>Satuan Pelaksana Program Indonesia Emas (Satlak Prima).</b>
Hari/Tanggal	: <b>Selasa, 19 Januari 2016.</b>
Pukul	: 10.00 WIB - Selesai.
Tempat	: Ruang Rapat Komisi X DPR RI.
Pimpinan Rapat	: Teuku Riefky Harsya, M.T./Ketua Komisi X DPR RI.
Sekretaris Rapat	: Sarilan Putri Kh, S.Sos/Kabagset. Komisi X DPR RI.
Acara	: <ol style="list-style-type: none"><li>1. Pemaparan Rencana Kerja Satlak Prima Tahun 2016;</li><li>2. Pemaparan Evaluasi Cabor-Cabor prestasi dalam Event Olahraga intrnasional (SEA Games 2017, Asian Games 2018, Olimpiade 2016).</li><li>3. Persiapan Pembinaan atlet menghadapi Olimpiade 2016 (5-21 Agustus), SEA Games 2017, dan Asian Games 2018;</li><li>4. Bagan koordinasi (Sinergitas) Satlak Prima terhadap Kemenpora, INASGOC, KONI dan KOI;</li><li>5. Lain-lain</li></ol>
Hadir	: 28 dari 53 Anggota Komisi X DPR RI.
Hadir Satlak Prima	: Ketua Satlak Prima (Achmad Sutjipto) beserta jajarannya.

**I. PENDAHULUAN.**

Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi X DPR RI dibuka pada pukul 10.40 WIB oleh Ketua Komisi X DPR RI/Teuku Riefky Harsya, M.T., setelah kuorum tercapai sebagaimana ditentukan dalam pasal 251 ayat (1) dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum sesuai Pasal 246 ayat (1) peraturan tata tertib DPR RI.

## II. CATATAN RAPAT.

1. Komisi X DPR RI menghargai pemaparan Satlak Prima mengenai Kerangka Kerja Strategik Satlak Prima menuju Asian Games 2018, Kerangka Kerja Strategik Satlak Prima 2015-2018, Proyeksi Perolehan Medali pada Asian Games 2018, dan Sinergisitas Satlak Prima.
2. Komisi X DPR-RI mempertimbangkan masukan beberapa hal yang akan ditindaklanjuti pada Raker/RDP dengan Pemerintah C.q Kemenpora RI dan pemangku kepentingan bidang olahraga lainnya, sebagai berikut:
  - a. Penegasan pembagian tugas Satlak Prima terkait dengan penyelenggaraan maupun pengiriman atlet pada berbagai ajang *multi-event*, baik tingkat ASEAN, Asia maupun Internasional.
  - b. Dukungan pembenahan lembaga keolahragaan Indonesia (*Indonesian Institute of Sport*) sebagai format baru dari Program Prima yang diharapkan menjadi badan keolahragaan resmi dan permanen sebagai pusat kecemerlangan (*center of excellent*) bagi pengelolaan atlet Indonesia.
  - c. Dukungan pembenahan aturan bagi pengembangan prestasi atlet nasional di ajang *multi-event* internasional melalui revisi Perpres No. 22 tahun 2010 tentang Satlak Prima.
  - d. Dukungan alokasi anggaran melalui RAPBN 2016 untuk kegiatan *multi-event* internasional yang perlu difasilitasi oleh Satlak Prima sesuai tugas dan fungsinya berdasarkan UU No. 3 tahun 2005 tentang SKN, Perpres No. 22 tahun 2010 tentang Satlak Prima dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  - e. Pengalokasian anggaran APBN 2016 untuk persiapan dan kesiapannya.
3. Merujuk tugas Satlak Prima berdasarkan Pasal 4 Perpres No. 22 Tahun 2010 Tentang Satlak Prima, Komisi X DPR-RI meminta Satlak Prima untuk:
  - a. Melakukan koordinasi secara intensif dengan Pemerintah, KONI, KOI, Inasgoc dan PB Cabor, serta memperbaiki sinergitas dengan para pemangku kepentingan olahraga nasional lainnya dengan prinsip saling melengkapi, tidak tumpang tindih, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
  - b. Untuk meningkatkan prestasi olahraga nasional, Satlak Prima perlu mengutamakan:
    - penguatan sumberdaya yang profesional untuk mendukung kinerja organisasi Satlak Prima.
    - pendampingan terhadap berbagai cabang olahraga dengan sport dan science-technology tanpa diminta oleh cabang olahraga tersebut.
    - pemberian asuransi kepada atlet, pelatih, wasit dan pelaku olahraga lainnya, untuk mendukung peningkatan prestasi olahraga nasional.
    - konsisten terhadap pentahapan strategik, agar target yang ditentukan Satlak Prima dapat terpenuhi.
    - menyusun mekanisme penggunaan keuangan negara yang akuntabel serta berkoordinasi dengan instansi pengawas keuangan negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- c. Sebagai bahan evaluasi kegiatan, akuntabilitas, dan tata kelola penggunaan dana APBN, khususnya APBN-P 2015 oleh Satlak Prima, Komisi X DPR RI meminta Satlak Prima untuk memberikan dokumen lengkap, paling lambat tanggal 25 Januari 2016:
- Laporan Keuangan Satlak Prima per Januari-Desember 2015, termasuk rincian anggaran di APBN-P 2015 sejumlah Rp.395.000.000.000,-.
  - Data Perbandingan Struktur Anggaran 2015-2016.
  - Laporan Pengawasan Internal Satlak Prima terhadap penggunaan dana APBN 2015.
  - Laporan Keuangan untuk honor atlet nasional (per-atlet/per-PB), termasuk dana untuk *training camp* tahun 2015.
  - Mekanisme (SOP) penggunaan dana (sesuai MoU dengan PPK yang ditunjuk Pengguna Anggaran).
  - Data tentang latarbelakang, termasuk status PNS atau non-PNS, dari para Pengurus Organisasi Satlak Prima periode 2015-2019.
  - Jawaban secara tertulis atas pertanyaan-pertanyaan anggota Komisi X DPR-RI yang belum terjawab, serta tambahan usulan dan dukungan yang diharapkan dari Komisi X DPR-RI oleh Satlak Prima.
- d. Memberikan masukan terhadap Panja Persiapan Asian Games 2018 Komisi X DPR-RI demi mewujudkan sukses penyelenggaraan, sukses prestasi, sukses pemberdayaan ekonomi rakyat dan sukses administrasi penyelenggaraan.

### III. PENUTUP.

Rapat ditutup pada pukul 15.10 WIB.

KETUA RAPAT,



TEUKU RIEFKY HARSYA, M.T.